

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola pengelolaan hutan di Nagari Sungai Batang dikelola secara mandiri oleh individu atau keluarga secara turun temurun berdasarkan penguasaan tanah yang mereka miliki serta kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Peran ninik mamak sangat sentral dalam hal pengelolaan hutan di Nagari Sungai Batang mulai dari pengaturan konsep sistem tenurial, bagi hasil, aturan tata kelola, sanksi dan penyelesaian konflik. Hutan memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat walaupun tidak dalam jumlah besar, namun hutan juga tidak dipandang sebagai faktor produksi belaka melainkan hutan diposisikan sebagai pengikat kekerabatan dan penopang kebutuhan lingkungan hidup yang bersih bagi masyarakat. Peran Pemerintah Nagari Sungai Batang sangat minim dalam hal memberdayakan masyarakat yang mengelola hutan. Minimnya pemberdayaan berbanding lurus dengan hasil yang diterima masyarakat sehingga potensi hutan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Masyarakat Nagari Sungai Batang.
2. Kegiatan pengawasan kehutanan merupakan bagian dari pengurusan hutan. Bahwa pengurusan hutan terdiri atas empat kegiatan yaitu perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kehutanan dan pengawasan. Namun dikarenakan hingga saat ini tidak ada satupun jenis izin pengelolaan hutan di Nagari

Sungai Batang kegiatan pengurusan hutan di Nagari Sungai Batang, tidak semua jenis kegiatan dan sub kegiatan dapat dilakukan. Untuk kegiatan pengawasan kehutanan belum terlaksana dengan baik mengingat hambatan internal berupa minimnya jumlah polisi kehutanan di Nagari Sungai Batang dan hambatan eksternal terkait penguasaan tanah oleh Masyarakat Hukum Adat di Nagari Sungai Batang. Karena hal tersebut kegiatan pengawasan kehutanan untuk saat ini di wilayah kerja KPHL Agam Raya ditekankan pada upaya persuasif.

B. Saran

1. Pengelolaan hutan di Nagari Sungai Batang yang selama ini dikelola dengan mandiri oleh individu dan keluarga secara turun temurun belum memberikan dampak ekonomis yang besar bagi Masyarakat Nagari Sungai Batang. Dalam hal ini peran Pemerintah Nagari Sungai Batang sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dalam hal tata kelola hutan melalui rencana-rencana kegiatan yang telah disusun dan segera mengeksekusi kegiatan tersebut demi meningkatkan taraf ekonomi Masyarakat Nagari Sungai Batang. Kemudian, kehadiran BUMNag sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program pemberdayaan masyarakat dalam hal tata kelola hutan sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai.
2. Kegiatan pengurusan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah harus gencar dilakukan terutama bagi masyarakat yang telah terlanjur mengelola hutan di dalam kawasan hutan salah satunya di Nagari Sungai Batang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang terlanjur mengelola hutan selama ini awam

dengan peraturan kawasan hutan dan pengelolaan hutan dilakukan atas dasar kepemilikan tanah ulayat yang mereka miliki. Maka dari itu untuk menjaga kelestarian hutan dan luas kawasan hutan maka Pemerintah harus lebih rutin melakukan sosialisasi dan fasilitasi jenis-jenis izin pengelolaan hutan salah satunya perhutanan sosial dan pengawasan kehutanan dengan pendekatan persuasif dan preventif.

3. Skema perhutanan sosial menjadi peluang bagi masyarakat Nagari Sungai Batang agar mendapatkan akses legal dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Maka dari itu, seharusnya Pemerintah Nagari Sungai Batang memanfaatkan peluang tersebut mengingat keuntungan yang ditawarkan dari perhutanan sosial merupakan jawaban atas kendala dan permasalahan pengelolaan hutan di Nagari Sungai Batang selama ini. Sehingga masyarakat dapat mengelola hutan dengan maksimal.

